

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2)
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi

APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
- (k) Peraturan Bupati Badung No. 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
- (l) Peraturan Bupati Badung No. 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- (m) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019
- (n) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019

- (o) Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Penjelasan belanja yang realisasi keuangannya dibawah 75%

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Neraca

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Kesimpulan Penting tentang Laporan Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pemerintah Kabupaten Badung telah berhasil melakukan capaian kinerja secara akumulatif terhadap aspek-aspek yang sifatnya indikator makro ekonomi dan indikator sosial yang strategis. Adapun aspek capaian indikator makro ekonomi dan sosial meliputi : pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, IPM, kemiskinan dan pengangguran.

Tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada dibawah tingkat inflasi nasional. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian masyarakat Kabupaten Badung. Sedangkan untuk angka IPM Kabupaten Badung cukup tinggi diantara Kabupaten di Bali. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun menurun. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain :

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan
 - a. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan.
 - b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada.
 - c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah.
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja
 - a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - b. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
 - c. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
 - d. Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja

- 3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
 - b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi.
 - c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2019 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yakni :

- Visi :

Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.

- Misi :

1. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
3. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersaing dengan kepariwisataan berbasis budaya.

2. Tujuan dan Sasaran.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka tujuan dan Sasaran yang ditetapkan adalah :

- Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi.
2. Meningkatkan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informasi.
3. Meningkatkan SDM sektor Komunikasi dan Informasi.

- Sasaran :

1. Terwujudnya pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi sesuai kebutuhan.
2. Terwujudnya pelayanan kebutuhan masyarakat akan jasa komunikasi dan informasi yang andal, efektif dan efisien.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Komunikasi dan Informatika yang mampu dan terampil di bidangnya.
4. Terwujudnya peran serta masyarakat di bidang komunikasi dan komunikasi yang tertib, aman, lancar dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang berbudaya informasi.
6. Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi informasi secara efektif dan efisien.

3. Rencana Kerja :

Setelah ditetapkan Tujuan maupun Sasaran, lebih lanjut perlu adanya program dan kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.
5. Program Peningkatan kualitas pemahaman dalam penyerapan informasi Media.
6. Program Pengelolaan Persandian Daerah.
7. Program Pengembangan Data/ Informasi/statistik,

Bab III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019.

Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran	R 2019	%
PENDAPATAN	196.000.000,00	143.475.280,08	73,20
BELANJA	141.540.743.227,96	139.962.727.642,96	98,89
SURPLUS/ (DEFISIT	141.344.743.227,96	139.819.252.362,88	98,92
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

Capaian pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp. 142.321.767,37 Komponen pendapatan terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
PAD	196.000.000,00	143.475.280,08	73,20
Jumlah	196.000.000,00	143.475.280,08	73,20

Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
Pendapatan Retribusi Daerah	196.000.000,00	132.108.000,00	67,40
Jumlah	196.000.000,00	132.108.000,00	67,40

Komponen Lain2 PAD terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
Lain-Lain PAD Yang Sah	00,00	11.367.280,08	0,00

Capaian belanja sebesar 98,89% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tahun 2019

NO	BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%
		Rp	Rp	
1.	Belanja Tidak Langsung	11.217.009.396,00	10.629.999.471,00	94,77
2.	Belanja Langsung	130.323.733.831,96	129.332.728.171,96	99,24
	Jumlah	141.540.743.227,96	139.962.727.642,96	98,89

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar Rp 10.629.999.471,00 atau sebesar 94,77 % dari anggaran Rp. 11.217.009.396,00 Komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
Belanja pegawai	11.217.009.396,00	10.629.999.471,00	94,77
jumlah	11.217.009.396,00	10.629.999.471,00	94,77

Komponen Belanja Pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	R 2019 (Rp)	%
Belanja gaji dan tunjangan	4.180.854.502,00	3.857.714.173,00	92,27
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.036.154.894,00	6.772.285.298,00	96,25
jumlah	11.217.009.396,00	10.772.285.298,00	94,77

Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp 129.235.197.018,96 atau 99,16 % dari anggaran Rp. 130.323.733.831,96

Komponen Belanja Langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
Belanja pegawai	2.274.460.000,00	2.228.200.000,00	97,97
Belanja barang jasa	68.749.406.149,00	68.150.730.714,00	99,13
Belanja modal	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,46
jumlah	130.323.733.731,96	129..356.771.996,96	99,16

Komponen Belanja Pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
Honorarium PPBJ	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	9.840.000,00	6.720.000,00	68,29
Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	211.420.000,00	211.420.000,00	100,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.050.080.000,00	2.006.940.000,00	97,90
Jumlah	2.274.460.000,00	2.228.200.000,00	97,97

Komponen Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
Belanja bahan pakai habis	710.895.268,00	629.295.908,00	84,54
Belanja Cetak dan Penggandaan	101.289.778,00	96.364.050,00	91,50
Belanja Jasa Kantor	61.931.810.553,00	61.639.734.700,00	99,58
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	279.791.300,00	124.099.929,00	44,35

Belanja Makanan dan Minuman	75.120.600,00	72.959.400,00	97,12
Belanja Perjalanan Dinas	279.996.400,00	267.689.300,00	95,60
Belanja Pemeliharaan	2.751.546.000,00	2.698.388.052,00	98,07
Belanja Bahan/Material	79.878.800,00	73.471.100,00	91,98
Belanja Premi Asuransi	80.136.000,00	80.136.000,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja	15.150.000,00	15.075.000,00	99,50
Belanja Jasa Konsultansi	889.591.450,00	889.591.450,00	100,00
Belanja Honorarium Non PNS	1.458.200.000,00	1.443.900.000,00	99,02
Belanja Honorarium PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
Jumlah	68.749.406.149,00	68.126.686.889,00	99,09

Komponen Belanja Modal terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	00,00
Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	0,00	0,00	00,00
Jumlah	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,46

Belanja Langsung di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang terinci sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja di Tiap Program Tahun 2019

No	Program	Aggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Pelayanan Administrasi	2.251.673.407	1.862.578.752	82,72
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.302.576.200	1.109.520.429	85,18
3	Pengembangan Peningkatan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	456.225.565	423.890.125	92,91
4	Perencanaan dan Penganggaran SKPD (Renja ,RKA)	3.745.600	3.745.600	100,00
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa	126.082.093.376,96	125.712.420.565,96	99,71
6	Peningkatan kualitas pemahaman dalam penyerapan informasi media	23.454.400	23.454.400	100,00
7	Penelolaan Persandian Daerah	132.746.500	129.146.500	97,29
8	Pengembangan Data /informasi/Statistik Daerah	71.218.783	67.971.800	95,44
		130.323.733.831,96	129.332.728.171,96	99,24

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Masukan dana : Rp. 140.986.696,-
- Realisasi : Rp. 107.445.611,-
- Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, air dan Telepon pada Diskominfo dengan target kinerja 12 bulan.
- Hasil : Terpenuhinya jasa komunikasi, listrik, air dan Telepon Dengan realisasi 76,21 %.
- Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung.

2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Masukan dana : Rp 24.791.300,-
- Realisasi : Rp. 19.248.700,-
- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang disamsat dan KIR dengan target
- Hasil : Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas / Oprasional SKPD / Unit, dengan realisasi sebesar 77.64 %.

- Sasaran : Kendaraan Dinas/Oprasional pada Diskominfo Kabupaten Badung.

3. Penyediaan jasa keuangan

- Masukan dana : Rp. 840.356.441,-
- Realisasi : Rp. 590.356.441,-
- Keluaran : Jumlah Penyediaan materai pada Dinas Kominfo
- Hasil : Tersedianya materai pada Diskominfo capaian realisasi 70.25%.
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika Badung.

4. Penyediaan alat tulis kantor :

- Masukan dana : Rp. 59.013.954,-
- Realisasi : Rp. 51.848.154,-
- Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor dengan target kinerja 12 bulan
- Hasil : Terwujudnya alat tulis kantor 12 Bulan realisasi 87.86 %.
- Sasaran : Alat Tulis Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan :

- Masukan dana : Rp. 31.491.416,-
- Realisasi : Rp. 28.190.800,-
- Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan yang memadai 12 bulan
- Hasil : Terwujudnya barang cetak dan penggandaan dengan target 12 bulan dengan realisasi sebesar 89.52 %.
- Sasaran : Barang Cetak dan Penggandaan Diskominfo Kabupaten Badung.

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor :

- Masukan dana : Rp. 39.275.000,-
- Realisasi : Rp. 34.050.000,-
- Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor Yang memadai dengan target kinerja 1 paket.

- Hasil : Optimalnya fungsi instalasi listrik/ penerangan bangunkantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 1 paket dengan realisasi 86.70 %.
- Sasaran : Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor Diskominfo Kabupaten Badung.

7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan :

- Masukan dana : Rp. 89.589.000,-
- Realisasi : Rp. 84.840.000,-
- Keluaran : Terlaksananya kebutuhan bacaan pada Diskominfo
- Hasil : Tercapainya kebutuhan bahan bacaan pada Diskominfo Dengan realisasi 94.70%.
- Sasaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman:

- Masukan dana : Rp. 16.185.600,-
- Realisasi : Rp. 15.974.400,-
- Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu dengan target kinerja 12 Bulan.
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman TamuDengan capaian kenerja 12 bulan, realisasi 98.70 %.
- Sasaran : Pegawai dan Tamu pada Diskominfo Kabupaten Badung.

9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah :

- Masukan dana : Rp. 200.000.000,-
- Realisasi : Rp. 187.692.900,-
- Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah dengan target kinerja 1 Paket/ 1 Tahun.
- Hasil : Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi keluar daerah Dengan capaian kinerja 93.85 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung.

10. Kegiatan penyediaan dekorasi :

- Masukan dana : Rp. 76.550.000,-
- Realisasi : Rp. 76.550.000,-
- Keluaran : Tersedianya bahan sarana dekorasi Kantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan target kinerja 1 Paket.

- Hasil : Terwujudnya Keindahan dan Keserasian Kantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 100 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung

11. Penyediaan bahan bakar kendaraan :

- Masukan dana : Rp. 355.350.000,-
- Realisasi : Rp. 290.967.750,-
- Keluaran : Jumlah bahan bakar kendaraan/Oprasional yang tersedia Pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan target kinerja 34.200 Liter 12 bulan.
- Hasil : Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 81.88 %.
- Sasaran : Kendaraan Dinas/ Operasional Diskominfo.

12. Kegiatan penyediaan upacara keagamaan :

- Masukan dana : Rp. 45.600.000,-
- Realisasi : Rp. 42.930.000,-
- Keluaran : Terlaksananya bahan upacara keagamaan pada Kabupaten Badung dengan target kinerja 12 bulan
- Hasil : Tersedianya upacara keagamaan pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 94.14 %.
- Sasaran : Sesajen/Aci-aci

13. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap:

- Masukan dana : Rp. 332.484.000,-
- Realisasi : Rp. 332.484.000,-
- Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dibayarkan
- Hasil : Meningkatnya Konerja Tenaga Kontrak dengan capaian kinerja 100.00 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung

A. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor:

- Masukan dana : Rp. 80.000.000,-
- Realisasi : Rp. 77.500.000,-
- Keluaran : Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung

- Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 96.88 %.
 - Sasaran : Perlengkapan Gedung Kantor
2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor :
- Masukan dana : Rp. 533.515.500,-
 - Realisasi : Rp. 533.515.500,-
 - Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan target 53 unit
 - Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100.00 %.
 - Sasaran : Peralatan Gedung Kantor.
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor :
- Masukan dana : Rp. 5.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 0,00
 - Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor, dengan target 1 Paket.
 - Hasil : Terwujudnya Gedung Kantor yang Representatif, capaian kinerja 0 %.
 - Sasaran : Bagian gedung/kantor yang rusak pada Diskominfo Kabupaten Badung.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Masukan dana : Rp. 255.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 104.851.229,-
 - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dengan target kinerja 35 kendaraan.
 - Hasil : Optimalnya fungsi kendaraan dinas /operasional dengan capaian kinerja 41.12 %.
 - Sasaran : Kendaraan dinas/Oprasional
5. Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor:
- Masukan dana : Rp. 0.00
 - Realisasi : Rp. 0.00
 - Keluaran : -
 - Hasil : -
 - Sasaran : -

6. Kegiatan Pemeliharaan peralatan kantor:
 - Masukan dana : Rp. 42.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 6.593.000,-
 - Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik dengan target kinerja 1 Paket.
 - Hasil : Terpeliharanyai peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja 15.70 %.
 - Sasaran : Peralatan gedung kantor yang rusak pada Diskomin
7. Monitoring dan dan Evaluasi pada Diskominfo
 - Masukan dana : Rp. 8.040.700,-
 - Realisasi : Rp. 8.040.700,-
 - Keluaran : Jumlah dokumen laporan monitoring dan dan Evaluasi pada Diskominfo, dengan target kinerja 10 buku.
 - Hasil : Terkendalinya kegiatan pada Diskominfo sesuai rencana dengancapaian kinerja 100.00 %
 - Sasaran : Seluruh kegiatan pada Diskominfo Kabupaten Badung.
8. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional :
 - Masukan dana : Rp. 379.020.000,-
 - Realisasi : Rp. 379.020.000,-
 - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dengan Target 26 Unit
 - Hasil : Tersedianya Kendaraan Roda 2 dan 4 dengan target Kinerja sebesar 100.00 %
 - Sasaran : Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Badun

B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :
 - Masukan dana : Rp. 450.651.650,-
 - Realisasi : Rp. 418.491.650,-
 - Keluaran : Honorarium Pengelola dengan target kinerja 42 orang
 - Hasil : Peningkatan Kegiatan Pada Dinas Kominfo dengan capaian kinerja 92.86 %
 - Sasaran : Pelaksana kegiatan pada Diskominfo.

2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

- Masukan dana : Rp. 5.573.915,-
- Realisasi : Rp. 5.398.475,-
- Keluaran : Jumlah dokumen AKIP dengan target kinerja 40 buku
- Hasil : Terukurnya Capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi dengan capaian 96.85 %.
- Sasaran : Kinerja Diskominfo.

C. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD (Renja ,RKA)

1. Penyusunan Perencanaan Dokumen SKPD

- Masukan dana : Rp. 3.745.600,-
- Realisasi : Rp. 3.745.600,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kominfo
- Hasil : Terencananya Kegiatan Pada Dinas Kominfo ,dengan capaian kinerja 100.00 %

E. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :

1. Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung

- Masukan dana : Rp. 32.943.756.219,75,-
- Realisasi : Rp. 32.943.756.219,75,-
- Keluaran : Jumlah Akses Internet di Kabupaten Badung
- Hasil : Meningkatnya akses internet bagi aparatur negara dan masyarakat dengan capaian kinerja 100.00 %.

3. Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 908.338.200,-
- Realisasi : Rp. 896.378.902,-
- Keluaran : Jumlah terpeliharanya CCTV di KabupatenBadung dengan target 553 unit.
- Hasil : Berfungsinya CCTV di Kabupaten Badung secara optimal Dengan capaian kinerja 98.68 %.
- Sasaran : Terpantaunya Keamanan Publik melalui CCTV di Kabupaten Badung.

4. Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada kawasan Strategis di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 12.849.608.596,21,-

- Realisasi : Rp. 12.539.218.111,21,-
 - Keluaran : Tersedianya sarana pengamanan di kawasan strategis di Kabupaten Badung dengan target 64 Kamera.
 - Hasil : Meningkatnya sarana pengamanan di kawasan strategis di Kabupaten Badung dengan hasil kinerja 97.58 %.
 - Sasaran : Kawasan strategis Kabupaten Badung yang belum terpasang CCTV
5. Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung :
- Masukan dana : Rp. 1.396.656.459,-
 - Realisasi : Rp. 1.396.656.459,-
 - Keluaran : Jumlah terbangunnya jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung
 - Hasil : Tersediannya Jaringan Internet/Internet yang Handal di Kawasan Puspem Badung dengan capaian kinerja 100.00 %.
 - Sasaran : Tersediannya Jaringan Internet yang Handal di Kawasan Puspem .
6. Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 256.167.832,-
 - Realisasi : Rp. 256.115.200,-
 - Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli yang Menangani Pengelolaan Data Center sebanyak 3 orang di Kabupaten Badung
 - Hasil : Data Center di Kabupaten Badung Berfungsi Secara Optimal dengan capaian kinerja 99.98 %.
 - Sasaran : Tersediannya Data Center di Kabupaten Badung .
7. Penerapan Teknologi informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung:
- Masukan dana : Rp. 1.618.309.380,-
 - Realisasi : Rp. 1.603.418.052,-
 - Keluaran : Prosentase Terbangunnya Sistem smart city Kabupaten Badung dengan target 1 paket
 - Hasil : Terbangunnya Sistem smart city Kabupaten Badung Dengan capaian kinerja 99.08 %
 - Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.
8. Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 1.719.687.550,-
 - Realisasi : Rp. 1.709.187.550,-

- Keluaran : Jumlah Kegiatan dlm rangka optimalisasi pengembangan smart city
- Hasil : Laporan pengembangan dan penerapan Smart city di Kabupaten Badung,dengan capaian kinerja 99.39 %.
- Sasaran : Dinas Kominfo.

9. Pemeliharaan WEB di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 141.381.230,-
- Realisasi : Rp. 141.379.300,-
- Keluaran : Jumlah WEB Kabupaten Badung yang terpelihara dengan target kinerja 1 paket
- Hasil : Tersebar nya Informasi melalui internet dg capaian 99.99 %
- Sasaran : Website Kabupaten Badung.

10. Pengelolaan Pusat Kendali di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 375.063.580,-
- Realisasi : Rp. 375.061.650,-
- Keluaran : Jumlah Pengelolaan Data Center sebanyak 10 orang di Kabupaten Badung
- Hasil : Terkelolanya Pusat Kendali Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 99.99 %.
- Sasaran : Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung .

11. Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 23.215.023.443,-
- Realisasi : Rp. 23.215.023.443,-
- Keluaran : Jumlah Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung
- Hasil : Tersedianya Peralatan Command Center di Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 100.00 %.
- Sasaran : Diskominfo Badung .

12. Pameran Pembangunan :

- Masukan dana : Rp. 68.573.847,-
- Realisasi : Rp. 59.497.437,-
- Keluaran : Jumlah Pameran Pembangunan Tahun 2018, dengan target kerja 1 paket.

- Hasil : Tersedianya informasi pembangunan di Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 86.76 %.
 - Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.
13. Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung,
- Masukan Dana : Rp. 31.018.390,-
 - Realisasi : Rp. 30.318.390,-
 - Keluaran : Jumlah Pameran Festival Budaya Pertanian Th 2019 1 paket.
 - Hasil : Tersebar nya Pembangunan di Kabupatenuapten Badung,dengan Kinerja 97.74%
 - Sasaran : Masyarakat / pengunjung pameran.
14. Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi,
- Masukan Dana : Rp. 13.863.062,-
 - Realisasi : Rp. 13.642.646,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan
 - Hasil : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Kinerja 98,41%
 - Sasaran : Masyarakat
15. Pengelolaan Data dan Informasi Publik,
- Masukan Dana : Rp. 300.690.860,-
 - Realisasi : Rp. 300.690.860,-
 - Keluaran : Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Publik
 - Hasil : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Kinerja 100.00%
 - Sasaran : Masyarakat
16. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik,
- Masukan Dana : Rp. 25.504.846,-
 - Realisasi : Rp. 25.304.846,-
 - Keluaran : Jumlah Sosialisasi
 - Hasil : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Kinerja 99.22%
 - Sasaran : Peserta Sosialisasi

17. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis Web (TI),

- Masukan Dana : Rp. 3.941.900,-
- Realisasi : Rp. 3.941.900,-
- Keluaran : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Binaan
- Hasil : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dikembangkan dan diberdayakan, dengan kinerja 100.00%
- Sasaran : Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Badung

18. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi,

- Masukan Dana : Rp. 140.321.150,-
- Realisasi : Rp. 140.321.150,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Peninjauan ke Lapangan
- Hasil : Terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, dengan kinerja 100.00%
- Sasaran : Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung

19. Penyelenggaraan Retribusi Menara

- Masukan Dana : Rp. 14.455.200,-
- Realisasi : Rp. 14.455.200,-
- Keluaran : Prosentase Pemungutan Terhadap Obyek Retribusi Menara Telekomunikasi
- Hasil : Tercapainya Target Retribusi Menara Telekomunikasi, dengan kinerja 100.00%
- Sasaran : Wajib Pajak Menara di Kabupaten Badung

20. Penyusunan Review Zona Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu

- Masukan Dana : Rp. 2.765.900,-
- Realisasi : Rp. 2.765.900,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Survey Kajian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Seluler
- Hasil : Terkendalinya Pembangunan Menara Telekomunikasi, dengan kinerja 100.00%
- Sasaran : Tersajinya Laporan Hasil Survey

21. Penyusunan Profile Pemerintah Daerah

- Masukan Dana : Rp. 1.006.500,-
 - Realisasi : Rp. 1.006.500,-
 - Keluaran : Jumlah Profile Citra Positif Pemerintah Kab. Badung
 - Hasil : Tersebar nya Informasi Publik/Citra Positif Pemerintah Kabupaten Badung, dengan kinerja 100.00%
 - Sasaran : -
22. Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran (Radio)
- Masukan Dana : Rp. 4.385.500,-
 - Realisasi : Rp. 4.385.500,-
 - Keluaran : Jumlah Informasi Publik Pemerintah Kab. Badung
 - Hasil : Tersedianya Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung, dengan kinerja 100.00%
 - Sasaran : -
23. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- Masukan Dana : Rp. 120.000,-
 - Realisasi : Rp. 120.000,-
 - Keluaran : Jumlah Cakupan Waktu Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
 - Hasil : Teratasinya Pengaduan Masyarakat, dengan kinerja 100.00%
 - Sasaran : -
24. Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security
- Masukan Dana : Rp. 2.014.334.200,-
 - Realisasi : Rp. 2.014.124.200,-
 - Keluaran : Persentase Pengadaan Perangkat Network Security
 - Hasil : Terjaminnya Keamanan Jaringan Data Intranet/Internet, dengan kinerja 99.99%
 - Sasaran : Seluruh Jaringan Data Intranet/Internet.
25. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet
- Masukan Dana : Rp. 5.826.212.032,-
 - Realisasi : Rp. 5.824.716.700,-
 - Keluaran : Persentase Terpeliharanya Infrastruktur Intranet/Internet
 - Hasil : Optimalnya Fungsi Jaringan Data Intranet/Internet, dengan kinerja 99.97%
 - Sasaran : Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet

26. Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Masukan Dana : Rp. 4.484.350,-
- Realisasi : Rp. 4.484.350,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Hasil : Pengimplementasian Smart City Berdasarkan Masterplan, dengan kinerja 100.00%
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika

27. Pengembangan Penyediaan Akses Internet

- Masukan Dana : Rp. 41.922.514.150,-
- Realisasi : Rp. 41.721.717.500,-
- Keluaran : Jumlah Akses Internet di Kabupaten Badung Yang Tersedia
- Hasil : Meningkatnya Akses Informasi Bagi Aparatur Negara dan Masyarakat , dengan kinerja 99.98%
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika

28. Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan 14084

- Masukan Dana : Rp. 283.909.000,-
- Realisasi : Rp. 282.975.000,-
- Keluaran : Jumlah Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
- Hasil : Memberi Kemudahan Kepada Masyarakat Dalam Menghubungi Pelayanan Kegawatdaruratan Serta Mencapai Penanggulangan Keadaan Darurat, dengan kinerja 99.67%
- Sasaran : Kelompok Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dalam Penyerapan Informasi Media

29. Literasi Media,

- Masukan Dana : Rp. 23.454.400,-
- Realisasi : Rp. 23.454.400,-
- Keluaran : Literasi Media yang Melibatkan Anak-Anak SMA se-Kabupaten Badung
- Hasil : Meningkatnya pemahaman siswa mengenai tata pemanfaatan media secara sehat, dengan kinerja 100.00%
- Sasaran : Siswa SMA di Kabupaten Badung

Program Pengelolaan Persandian Daerah

30. Pengelolaan Teknis Persandiaan :

- Masukan dana : Rp. 132.746.500,-
- Realisasi : Rp. 129.146.500,-
- Keluaran : Terkelolanya Teknis Persandian
- Hasil : Teknis Persandian Terkelola dengan Baik capaian 97.29 %.
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

31. Penggandaan Data Sektoral Statistik :

- Masukan dana : Rp. 61.506.016,-
- Realisasi : Rp. 59.179.900,-
- Keluaran : Jumlah Buku Data Pembangunan Daerah.
- Hasil : Tersedianya Buku Data Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 96.22 %
- Sasaran : -

32. Forum Data Statistik :

- Masukan dana : Rp. 9.712.767,-
- Realisasi : Rp. 8.791.900,-
- Keluaran : Prosentase Koordinasi Pengelolaan Data Statistik.
- Hasil : Terlaksananya Prosentase Koordinasi Pengelolaan Data Statistik, capaian kinerja 90.52 %.
- Sasaran : -

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada Umumnya kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terlalu signifikan namun dalam capaian kinerja yang dihadapi terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Tidak tepatnya jadwal pelaksanaan dilapangan dengan Anggaran Kas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
3. Tidak Tercapainya Realisasi Pendapatan Retribusi di Sebabkan Karena Tidak Sesuainya Jumlah Pendapatan yang Dibebankan Dengan Jumlah Wajib Pajak Yang Ada.

3.3 Penjelasan belanja yang realisasi keuangannya di bawah 75 % :

1. Belanja telepon pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran setelah perubahan sebesar Rp 20.000.000,00 realisasinya Rp 5.697.497,00 (28,49%) kurang dari 75% dikarenakan direalisasikan sesuai dengan tagihan.
2. Belanja Jasa KIR pada kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran setelah perubahan sebesar Rp 300.000,00 terealisasi sebesar Rp 74.000,00 (22,42%) kurang dari 75% karena hanya satu mobil yang di-KIR.
3. Belanja Jasa Transaksi Keuangan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 837.104.441,00 realisasinya Rp 587.104.441,00 (70,14%) kurang dari 75% karena di sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Belanja Bahan Alat Listrik dan Elektronik pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.775.000,00 (47,75%) kurang dari 75% karena realisasi sesuai dengan kebutuhan.
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 255.000.000,00 realisasinya Rp 104.851.229,00 (41,12%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan perawatan kendaraan.
6. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor pada kegiatan Pemeliharaan Peralatan kantor, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 42.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.593.000,00 (15,70%) kurang dari 75% Karena Banyak Komputer yang Baru.
7. Belanja Penjilidan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 150.000,00 terealisasi sebesar Rp 95.000,00 (63,33%) kurang dari 75% karena Realisasi Anggaran Sesuai Kebutuhan.
8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan Pameran Pembangunan, anggaran setelah perubahan Rp 1.125.000,00 realisasi sebesar Rp 750.000,00 (66,67%) karena Realisasi Anggaran Sesuai Kebutuhan.
9. Belanja Pemeliharaan Kantor/Gedung/Bangunan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor anggaran setelah perubahan Rp 5.000.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0.00%) kurang dari 75% karena sesuai dengan ada atau tidaknya Perbaikan Gedung Kantor.
10. Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran setelah perubahan Rp

9.840.000,00 realisasi Rp 6.720.000,00 (68,29%) kurang dari 75% karena Honorarium di Realisasikan Sesuai Dengan Berita Acara.

11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung anggaran setelah perubahan Rp 1.260.000,00 realisasi Rp 735.000,00 (58,33%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan banyaknya rapat.
12. Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pameran Pembangunan di Kabupaten Badung anggaran setelah perubahan Rp 1.125.000,00 realisasi Rp 750.000,00 (66,67%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan banyaknya Rapat.
13. Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security di Kabupaten Badung anggaran setelah perubahan Rp 630.000,00 realisasi Rp 420.000,00 (66,67%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan banyaknya Rapat.
14. Belanja Penjilidan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi anggaran setelah perubahan Rp 150.000,00 realisasi Rp 95.000,00 (63,33%) kurang dari 75% disesuaikan dengan kebutuhan.
15. Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Anggaran Setelah Perubahan 196.000.000,- dengan Realisasi 132.108.000,- (73,20) Kurang dari 75 % dikarenakan Terjadinya Perubahan Target Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi dari Diskominfo Dengan Perhitungan Data Menara Berijin 185 Menara dikalikan Rp. 654.000 dengan Proyeksi Penerimaan Sebesar Rp. 120.990.000, Kemudian dari Bapenda Dirubah Target Penerimaannya Menjadi Sebesar Rp. 196.000.000,- pada Simda Keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di

Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.3. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

I.4. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.5. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka

pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

I.8. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.9. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva tang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

II.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

II.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh

instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

II.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

II.7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2019 dihitung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

III.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan

angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

III.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak jud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai ninal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

I V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

IV.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

IV.2 . Uang Muka Kas Daerah

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

IV.3. Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah

sampai dengan tanggal Neraca.

Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

IV.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

V.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

V.2 .EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima

pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan pelaporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan disajikan tepat waktu. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sbb:

a. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah Pendapatan Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan kondisi antara lain: Beban diakui sebelum pengeluaran kas, Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban atas beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam Laporan Operasional disesuaikan dengan klasifikasi ekonomi yaitu

- Beban Operasi
- Beban Transfer
- Beban Non Operasional
- Beban Luar Biasa

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain

-Pengeluaran Beban tahun berkenaan

Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja

-Informasi lainnya yang dianggap perlu

c. Surplus/Defisit dari operasi

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos ini.

d. Kegiatan Non Operasional

e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa

f. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah

g. Surplus/Defisit LO

Merupakan surplus/defisit Lo pada akhir periode pelaporan yang dipindahkan ke pelaporan perubahan ekuitas.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

Jumlah Pendapatan-LRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 196.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 143.475.280,08,- Sedangkan realisasi pendapatan LRA tahun 2018 sebesar Rp. 12.407.951,00.

Perbandingan Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2019 dan 2018 sesuai Stándar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Target setelah Angg. Perubahan 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	
a	Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA	196.000.000,00	143.475.280,08	73,20	12.407.951,00
	J U M L A H	196.000.000,00	143.475.280,08	73,20	12.407.951,00

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah -LRA, target anggaran setelah perubahan 2019 sebesar Rp. 196.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 143.475.280,08 sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2018 sebesar Rp. 12.407.951,00 Rincian atas Realisasi PAD – LRA tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
a.	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	196.000.000,00	132.108.000,00	67,40	0,00
	Lain-lain PAD yang sah.		11.367.280,08	0,00	12.407.951,00
	<u>LRA</u>				
	* Belanja	141.540.743.227,96	139.962.727.642,96	98,89	53.863.531.490,81
	BELANJA OPERASI	82.240.875.545,00	80.984.886.360,00	98,47	27.637.198.532,00
	- Belanja Pegawai	13.491.469.396,00	12.858.199.471,00	95,31	11.546.188.923,00
	- Belanja Barang dan Jasa	68.749.406.149,00	68.126.686.889,00	99,09	16.091.009.609,00
	BELANJA MODAL	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,64	26.226.332.958,81
	- Blj Modal Peralatan dan Mesin	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,46	25.929.602.808,81
	- Blj Modal Gedung dan Bangunan	0,00			25.160.000,00
- Blj Modal Aset Tetap Lainnya	0,00			271.570.150,00	

	JUMLAH	(141.344.743.227,96)	(139.819.252.362,88)	98,92	(53.851.123.539,81)
--	---------------	----------------------	----------------------	-------	---------------------

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun 2019.

Gambaran Angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA secara terperinci adalah sebagai berikut :

a.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0.00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 11.367.280,08 atau 0.00% sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 12.407.951,00

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA sebagai berikut :

Tabel 5.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro - LRA	0.00	11.367.280,08	0.00	12.407.951,00
2	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	11.367.280,08	0.00	12.407.951,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa

- a. **Jasa Giro Pemegang Kas** dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 11.367.280,08 atau 0,00 %. Mengalami penurunan dari tahun 2018 yang teralisasi sebesar Rp.12.407.951,00

Berikut rincian penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas tahun 2019

Tabel.5.1.4 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Bulan	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
1	Januari	820.146,77	1.057.295,13
2	Pebruari	1.060.815,13	1.045.594,94
3	Maret	875.749,20	1.177.877,91
4	April	1.053.213,47	1.294.516,07
5	Mei	852.004,57	1.192.942,32
6	Juni	669.506,53	1.132.698,29
7	Juli	515.865,62	1.217.784,84
8	Agustus	630.584,66	996.797,52
9	September	1.250.684,82	797.956,96
10	Oktober	1.273.392,94	797.608,86

11	Nopember	1.211.623,66	909.078,94
12	Desember	1.153.692,71	787.799,42
	JUMLAH	11.367.280,08	12.407.951,00

Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 11.367.280,08 merupakan jumlah penerimaan Jasa giro selama Tahun Anggaran 2019. Yang mana semua penerimaan Jasa Giro tersebut di *auto debet* dengan dikeluarkannya Nota Debet oleh pihak bank.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja dengan target anggaran sebesar Rp 141.540.743.227,96, realisasinya sebesar Rp 139.962.727.642,96 atau 98,89%. Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 53.863.531.490,81 Belanja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berikut rincian belanja tahun 2019

Tabel.5.1.2 Belanja th.2019 dan tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
a.	Belanja Operasi	82.240.875.545,00	80.984.886.360,00	98,47	27.637.198.532,00
b.	Belanja Modal	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,46	26.226.332.958,81
	Jumlah Belanja	141.540.743.227,96	139.962.727.642,96	98.89	53.863.531.490,81

1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp.82.240.875.545,00 terealisasi sebesar Rp. 80.984.886.360,00 atau 98,47%, mengalami kenaikan sebesar Rp. 53.347.687.828,00 dibandingkan realisasi belanja th.2018 yang besarnya Rp.27.637.198.532,00.

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	13.491.469.396,00	12.858.199.471,00	95.31	11.546.188.923,00
2	Belanja Barang dan Jasa	68.749.406.149,00	68.126.686.889,00	99.09	16.091.009.609,00
	Jumlah	82.240.875.545,00	80.984.886.360,00	98.47	27.637.198.832,00

Gambaran realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Pegawai, terealisasi Rp. 12.858.199.471,00 dari anggaran Rp. 13.491.469.396,00 atau 95.31%, Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 11.546.188.923,00 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.180.854.502,00	3.857.714.173,00	92.27	3.916.186.456,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.036.154.894,00	6.772.285.298,00	96.25	7.605.771.467,00
3	Honorarium PPBJ	3.120.000,00	3.120.000,00	100.00	0.00
4	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	9.840.000,00	6.720.000,00	68,29	0.00
5	Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	211.420.000,00	211.420.000,00	100,00	0.00
6	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.050.080.000,00	2.006.940.000,00	97.90	0.00
7	Belanja Uang Lembur	0.00	0.00	0.00	24.231.000,00
	Jumlah	13.491.469.396,00	12.858.199.471,00	95.31	11.546.188.923,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas, Tahun 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut

Belanja Barang dan Jasa, terealisasi Rp. 68.126.686.889,00 dari anggaran Rp.68.749.406.149,00 atau 99.09% mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp.16.091.009.609,00.

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	710.895.268,00	629.295.908,00	84.54	678.096.500,00
2	Belanja Bahan/Material	79.878.800,00	74.471.100,00	91.98	119.526.100,00
3	Belanja Jasa Kantor	61.931.810.553,00	61.639.734.700,00	99.58	7.028.775.218,00
4	Belanja Premi Asuransi	80.136.000,00	80.136.000,00	100.00	56.517.000,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	279.791.300,00	124.099.929,00	44.35	114.931.176,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.289.778,00	96.364.050,00	91.50	179.476.700,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	75.120.600,00	72.959.400,00	97.12	128.948.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0.00	0.00	0.00	2.950.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	279.996.400,00	267.689.300,00	95.60	1.146.044.815,00
10	Belanja Pemeliharaan	2.751.546.000,00	2.698.388.052,00	98.07	757.262.900,00
11	Belanja Honorarium PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	100.00	4.153.510.000,00
12	Belanja Honorarium Non PNS	1.458.200.000,00	1.443.900.000,00	99.02	1.265.750.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.150.000,00	15.075.000,00	99.50	32.965.000,00

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
14	Belanja Jasa Konsultansi	889.591.450,00	889.591.450,00	100,00	411.256.200,00
15	Belanja Uang Yang diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Jumlah	68.749.406.149,00	68.126.686.889,00	99,09	9.918.299.479,00

2. Belanja Modal

Target anggaran sebesar Rp. 59.299.867.682,96 terealisasi Rp. 58.977.841.282,96 atau sebesar 99,46% mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.226.247.487,81 dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.26.226.332.958,81. Komponen belanja modal sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,46	25.929.602.808,81
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				271.570.150,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				25.160.000,00
	Jumlah	59.299.867.682,96	58.977.841.282,96	99,46	26.226.332.958,81

Belanja modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Belanja modal peralatan dan Mesin terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas

Tabel.5.1.5.1. Rincian Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2019	REALISASI 2019	
			Rp	%
1	Sepeda Motor	379.020.000,00	379.020.000,00	100,00
		-	-	-
	Jumlah	379.020.000,00	379.020.000,00	100,00

5. Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Tabel 5.1.5.4. Rincian Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

URAIAN	Anggaran 2019	REALISASI 2019	
		Rp	%
Pemasangan Jaringan CCTV	12.605.186.061,21	12.294.836.061,21	97,54
Jumlah	12.605.186.061,21	12.294.836.061,21	97,54

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Saldo Pendapatan LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 143.475.280,08 mengalami penurunan sebesar Rp. 131.067.329,08 atau 1.056,32% dibandingkan tahun 2018 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 12.407.951,00. Realisasi Pendapatan LO Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.8. Rincian Pendapatatan LO Tahun 2019 dan tahun 2018

No	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1	PENDAPATAN-LO	143.475.280,08	12.407.951,00
	a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	132.108.000,00	-
	b. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	11.367.280,08	12.407.951,00

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.143.475.280,08 mengalami kenaikan sebesar Rp131.067.329,08 atau 1.056,32% dibandingkan tahun 2018 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 12.407.951,00

Tabel 5.9. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	132.108.000,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah – LO	11.367.280,08	12.407.951,00
Jumlah	143.475.280,08	12.407.951,00

Saldo masing-masing jenis PAD TA. 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Penerimaan Jasa Giro – LO	11.367.280,08	12.407.951,00
Pendapatan dari Pengembalian– LO		
Jumlah	11.367.280,08	12.407.951,00

Pendapatan Jasa Giro pemegang kas tahun 2019 terealisasi Rp. 11.367.280,08 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.040.670,92 dibandingkan tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 12.407.951,00.

B. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 0,00

Tabel 5.10. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2018 dan tahun 2017

No	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	-	-
	- Pendapatan Hibah LO		

5.2.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2019 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.11 .Rincian Beban tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
BEBAN	81.648.616.108,00	49.409.325.933,00
Beban Pegawai	12.692.877.199,00	11.814.098.163,00
Beban persediaan	863.866.883,00	599.291.700,00
Beban Jasa	49.058.965.061,00	26.847.709.783,00
Beban Pemeliharaan	2.822.487.981,00	872.194.076,00
Beban Perjalanan Dinas	267.689.300,00	1.146.044.815,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.942.729.684,00	8.129.987.396,00

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 terdapat beban sebesar Rp. 81.648.616.108,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.32.239.290.175,00 dari realisasi tahun 2018 Rp. 49.409.325.933,00 Beban disini berupa beban operasi yang terdiri dari :

- Beban Pegawai terealisasi Rp. 12.692.877.199,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 878.779.036,00 atau 7,44 % dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 11.814.098.163,00

Tabel 5.12. Rincian beban pegawai tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Beban Gaji dan Tunjangan	3.857.714.173,00	3.916.186.456,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	6.772.285.298,00	7.873.680.707,00
Beban Uang Lembur	0,00	24.231.000,00
Honorarium PNS	2.228.200.000,00	0,00
Jumlah	12.692.877.199,00	11.814.098.163,00

- Beban persediaan terealisasi Rp. 863.866.883,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 264.575.183,00 atau 64,74 % dari realisasi tahun 2018 Rp. 599.291.700,00

Tabel 5.13. Rincian beban persediaan tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Beban Bahan Pakai Habis	621.417.833,00	455.734.200,00
Beban Persediaan Bahan /Material	73.471.100,00	0,00
Beban Cetak dan Penggandaan	96.018.550,00	143.557.500,00
Beban Makanan dan Minuman	72.959.400,00	0.00
Jumlah	863.866.883,00	599.291.700,00

- Beban jasa terealisasi Rp. 49.058.965.061,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.211.255.278,00 atau 82.73% dari realisasi tahun 2018 Rp. 26.847.709.783,00

Tabel 5.14. Rincian beban jasa tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Beban Jasa Kantor	47.438.929.061,00	20.780.813.583,00
Beban Premi Asuransi	80.136.000,00	56.517.000,00
Beban Makanan dan Minuman	0,00	128.948.000,00
Beban Pakaian Kerja	0,00	32.965.000,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	2.950.000,00
Beban Jasa Konsultansi	0,00	411.256.200,00
Beban Honorarium PNS	96.000.000,00	4.153.510.000,00
Beban Honorarium Non PNS	1.443.900.000,00	1.265.750.000,00
Beban Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	15.000.000,00
Jumlah	49.058.965.061,00	26.847.709.783,00

- Beban Pemeliharaan terealisasi Rp. 2.822.487.981,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.950.293.905,00 atau 223.61 % dari realisasi tahun 2018 Rp. 872.194.076,00.

Tabel 5.15. Rincian beban pemeliharaan tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Beban Pemeliharaan	2.698.388.052,00	757.262.900,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	124.099.929,00	114.931.176,00
Jumlah	2.822.487.981,00	872.194.076,00

- Beban Perjalanan Dinas Rp. 267.689.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. (878.355.515,00) atau (76,64%) dari realisasi tahun 2017 Rp. 1.146.044.815,00

Tabel 5.16. Rincian beban perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	171.450.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	267.689.300,00	974.594.815,00
Jumlah	267.689.300,00	1.146.044.815,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp. 15.942.729.684,00 mengalami

kenaikan Rp. 7.812.742.288,00 atau 50.99% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 8.129.987.396,00.

Tabel 5.17. Rincian beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Beban Penyusutan	15.942.729.684,00	8.090.304.296,00
Beban Amortisasi	0.00	39.683.100,00
Jumlah	15.942.729.684,00	8.129.987.396,00

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok.

5.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.18. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
EKUITAS AWAL	27.959.754.328,76	23.093.965.761,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(81.505.140.827,92)	(49.396.917.982,00)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	-	(383.803.500,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya (Aset Tetap)	-	(738.296.509,95)
Koreksi Ekuitas Lainnya (Aset Lainnya)	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya (Beban)	-	57.090.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	139.819.252.362,88	53.851.123.539,81
EKUITAS AKHIR	86.273.865.863,72	27.959.754.328,76

Ekuitas awal sebesar Rp. 27.959.754.328,76 yang merupakan saldo ekuitas th. 2018.

Surplus/Defisit LO terealisasi Rp.(81.505.140.827,92) mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. (49.396.917.982,00).

Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2018 sebesar Rp. 139.819.252.362,88 mengalami kenaikan sebesar Rp. 85.968.128.823,07 dari saldo tahun 2018 sebesar Rp.53.851.123.539,81.

Ekuitas Akhir tahun 2019 sebesar Rp. 86.273.865.863,72 mengalami kenaikan sebesar Rp. 58.314.111.534,96 dari saldo tahun 2018 Rp. 27.959.754.328,76

5.4 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang mencakup aset kewajiban dan modal/ekuitas.

Berikut Total Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2019 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Komponen Aset terdiri dari :

1. Aset

			2019		2018
5.1.9	ASET	Rp.	0.00	Rp.	0.00
	Aset Lancar	Rp.	0,00	Rp.	0,00
	a.Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0.00
	b.Persediaan	Rp.	24.763.825,00	Rp	1.483.250,00
	JUMLAH ASET LANCAR	Rp.	24.763.825,00	Rp.	1.483.250,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2019, yang terdiri dari Sisa Kas (Uang Persediaan/UP) di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2019 yang telah disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yaitu STS UP Nomor: 001/Bend.Pengeluaran Diskominfo/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 831.229.160,00 (Fotocopy STS terlampir).

Sehingga saldo Bank Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 009.010.5001910 sebesar Rp. 0,00

a.) Persediaan Tahun 2019 Rp 24.763.825,00

Rincian Persediaan tahun 2019 sebagai berikut

Tabel.5.19. Rincian Persediaan tahun 2019 dan tahun 2018

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp.) Per 31 Des 2018	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.) Per 31 Des 2019
			Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
1	Alat Tulis Kantor	400.750,00	2.773.825,00	400.750,00	2.773.825,00
2	Barang Cetak	32.500,00	360.000,00	32.500,00	360.000,00
3	Bahan Bakar	0,00	18.528.000,00	0,00	18.528.000,00
4	Perangko,Materai	1.050.000,00	3.102.000,00	1.050.000,00	3.102.000,00
Jumlah		1.483.250,00	24.763.825,00	1.483.250,00	24.763.825,00

Persediaan di Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 2.773.825,00 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 400.750,00.
2. Persediaan Barang Cetak sebesar Rp. 360.000,00 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 32.500,00.
3. Persediaan Bahan Bakar sebesar Rp. 18.528.000,00 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 0,00. Dikarenakan adanya kegiatan yang dirasionalisasi, yaitu Kegiatan Literasi Media dan Kegiatan Pelayanan Informasi Melalui radio dimana BBM tersebut sudah di SPJ kan sehingga penggunaannya tidak maksimal.
4. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp 3.102.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 1.050.000,00.

2. Aset Tetap Rp 86.330.251.225,61

Saldo aktiva tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 86.330.251.225,61

a) Tanah Rp. 0,00

b) Peralatan dan Mesin Rp. 79.024.175.351,84

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 79.024.175.351,84 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan saldo Rp. 77.098.403.915,42

Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp79.024.175.351,84 Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi dan Imnformatika Kabupaten Badung periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 5.20. Daftar Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2019

Saldo Akhir	Rp	79.024.175.351,84	Rp	77.098.403.915,42
		Tahun 2019		Tahun 2018
Saldo Awal				
- Peralatan dan Mesin	Rp	77.098.403.915,42	Rp	32.921.158.772,47
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	3.067.552.600,00	Rp	25.929.602.808,81
- Belanja Modal (Hutang)	Rp	-	Rp	55.312.438.682,96
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	229.204.000,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	1.308.888.499,95
	Rp.			
- Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran				
Jumlah	Rp	3.067.552.600,00	Rp	82.780.133.991,72
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Hasil Sensus (Penyesuaian ke Aset Lainny	Rp	1.141.781.163,58	Rp	38.597.678.848,77
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	5.210.000,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.141.781.163,58	Rp	38.602.888.848,77
Jumlah	Rp	79.024.175.351,84	Rp	77.098.403.915,42

c) Gedung dan Bangunan Rp. 1.612.112.638,08

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.612.112.638,08 yang mana tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang bersaldo Rp.1.612.112.638,08. Hal ini disebabkan karena adanya penyerahan hasil pekerjaan belanja modal.

Tabel 5.17 Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2019

Saldo Akhir	Rp	1.612.112.638,08	Rp	1.612.112.638,08
		Tahun 2019		Tahun 2018
Saldo Awal				
- Gedung dan Bangunan	Rp	1.612.112.638,08	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp		Rp	1.893.471.138,08
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	-	Rp	1.893.471.138,08
Pengurangan				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp		Rp	281.358.500,00
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	281.358.500,00
Jumlah	Rp	1.612.112.638,08	Rp	1.612.112.638,08

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 39.169.511.260,69

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 39.169.511.260,69 yang artinya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 Rp.. 38.571.661.260,69 Berikut rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2019.

Tabel 5.18 Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2019 dan tahun 2018

Saldo Akhir	Rp	39.169.511.260,69	Rp	38.571.661.260,69
		Tahun 2019		Tahun 2018
Saldo Awal				
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	38.571.661.260,69	Rp	188.918.250,00
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	38.382.743.010,69
- Penyesuaian KIB Berupa Jaringan CCTV	Rp		Rp	0,00
		597.850.000,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	597.850.000,00	Rp	38.382.743.010,69
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00		
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	39.169.511.260,69	Rp	38.571.661.260,69

e) Aset Tetap Lainnya Rp 96.316.000,00

Saldo aset tetap lainnya pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2019 sebesar Rp 96.316.000,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Berikut rincian aset tetap lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2019.

Tabel.5.20 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

Saldo Akhir	Rp 96.316.000,00		Rp 96.316.000,00	
	Tahun 2019		Tahun 2018	
Saldo Awal				
- Aset Tetap Lainnya	Rp	96.316.000,00	Rp	96.316.000,00
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	-	Rp	-
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00		
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	96.316.000,00	Rp	96.316.000,00

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00

Tabel 5.21 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2019 dan tahun 2018

Saldo Akhir	Rp		Rp	
	Tahun 2018		Tahun 2017	
Saldo Awal				
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-	Rp	380.710.000,00
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	-	Rp	-
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	380.710.000,00
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	380.710.000,00
Jumlah	Rp	-	Rp	-

f). Akumulasi Penyusutan Rp. (33.571.864.025,00)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (33.571.864.025,00) mengalami kenaikan dibandingkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (18.740.658.793,47) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagaiberikut:

NO	URAIAN	NERACA	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
		31 Des 2019	31 Des 2019	31 Des 2018
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	79.024.175.351,84	(14.353.758.938,00)	(18.395.563.189,47)
3	Gedung dan Bangunan	1.612.112.638,08	(52.024.269,00)	(5.373.708,00)
4	Jalan Irigasi Jaringan	39.169.511.260,69	(1.536.946.477,00)	(339.721.896,00)
5	Aset Tetap Lainnya	96.316.000,00	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	-	-
Jumlah		119.902.115.250,61	(15.942.729.684,00)	(18.740.658.793,47)

(Daftar penyusutan aset tetap tahun 2019 terlampir)

3. Aset Lainnya Rp. 34.652.128,11

- a) Tagihan Jangka Panjang Rp. 0,00
- b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp. 0,00
- c) Aset Tidak Berwujud Rp. 4.395.417,00
- d) Aset Lain-lain Rp. 30.256.711,11

4. KEWAJIBAN Rp 111.405.898,00

- 1) Kewajiban Jangka Pendek Rp. 111.405.898,00

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- a) Utang PFK Rp. 0,00
- b) Utang Bunga Rp. 0,00
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp. 0,00
- d) Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0,00
- e) Utang Beban Rp. 111.405.898,00
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 0,00

Utang Beban Rp. 111.405.898,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 111.405.898,00, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 dimana saldo utang beban sebesar Rp. 15.367.125.259,00. Rincian utang beban per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

URAIAN	2019	2018
Belanja Telepon	630.893,00	299.167,00
Biaya Listrik CCTV	8.188.037,00	8.620.961,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	34.184.000,00	7.524.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinamis Triwulan IV	68.402.968,00	246.247.275,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinamis (Absensi Tgl 20 s/d 31 Des 2018)		14.137.965,00
Utang Beban Barang Jasa (Bunga atas keterlambatan pembayaran utang pengadaan belanja modal Peralatan Comand Center dan Data Center 2018)		232.150.234,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung		242.472.450,00
Pengadaan dan Pengawasan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung Belanja Jasa Konsultansi Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung		647.119.000,00
Pembayaran Belanja Kawat Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit keg. Penyediaan Akses Internet		13.613.600.000,00
Utang Beban barang Jasa (Bunga Atas keterlambatan Pembayaran Utang Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung)		13.966.565,00
Utang Beban Barang Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Studio Film, Sound System Ruang Rapat Lantai II, Layar Monitor, LCD+Layar Proyektor Tahun 2018)		5.335.155,00
Utang Beban Barang dan Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Jasa Konsultansi dan Pengawasan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV di Kab. Badung 2018)		2.424.725,00
Utang Beban Barang dan jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Jasa Konsultansi dan Pengawasan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Akses Internet di Kab. Badung 2018)		6.471.190,00
Utang Beban Barang dan Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun 2018)		3.790.200,00
Utang Beban Barang dan Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung Tahun 2018)		186.830.372,00
Utang Beban Barang dan Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung		136.136.000,00
Jumlah	111.405.898,00	15.367.125.259,00

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 0.00

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0.00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dimana utang beban tercatat Rp. 55.332.438.682,96 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2019	2018
1	Pengadaan Belanja Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018	0,00	23.215.023.443.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Sound System Untuk Ruang Rapat Lantai II. Sound System Untuk Ruang Rapat Lt. III., Layar Monitor Untuk Ruang Rapat Lt. III, LCD+Layar Proyektor	0,00	553.515.500.00
3	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	379.020.000.00
4	Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung	0.00	1.396.656.459.00
5	Kegiatan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	0.00	11.105.186.061,21
6	Belanja Modal Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	0.00	18.683.037.219,75
	Jumlah	0.00	55.332.438.682,96

2). Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00

a) Utang Dalam Negeri Rp. 0,00

b) Utang Luar Negeri Rp. 0,00

5. EKUITAS Rp. 86.273.865.863,72

1). Ekuitas Rp. 86.273.865.863,72

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2019 yang dikelola oleh SKPD, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.

86.273.865.863,72 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 27.959.754.328,76 dengan rinciannya sebagai berikut.

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	27.959.754.328,76	23.093.965.761,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(81.505.140.827,92)	(49.396.917.982,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	-	(383.803.500,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Tetap)	0,00	738.296.509,95
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Lainnya)	4.395.417,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya (Beban)	0,00	57.090.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	139.819.252.362,88	53.851.123.539,81
EKUITAS AKHIR	86.278.261.280,72	27.959.754.328,76

Koreksi ekuitas lainnya (aset tetap) pada tahun 2019 tercatat Rp 0.00, karena tidak adanya mutasi aset tetap antar OPD.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung yang menyatakan mandat yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika. Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 5 (lima) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kepala Seksi
5. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian
6. 56 (lima puluh enam) orang staf
7. 87 (delapan puluh tujuh) orang Tenaga Kontrak.

BAB VII

KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Sebagai akhir dari Laporan Catatan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Perubahan tahun 2019 yang direncanakan dapat direalisasikan atau dilaksanakan dengan prosentase capaian program pada BAB V diatas.

Program-program yang dilaksanakan capaian rata-rata pencapaian fisik 100 % sedangkan realisasi keuangannya rata-rata sebesar 98,92% diantaranya :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dapat terlaksana dengan baik yakni dengan lancarnya pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yakni untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangandiarahkan untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan SKPD dan capaian realisasi keuangan.
3. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD dimaksudkan untuk tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik dengan dukungan data yang akurat.
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan untuk mempercepat informasi dan peningkatan penguasaan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Informasi Media.
6. Program Pengelolaan Persandian Daerah
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun Anggaran 2019 yang berbasis AkruaI dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Mangupura, 27 Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung

I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos.M.A.P
Pembina TK I
NIP. 19750207 199311 1 002